

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI MENUJU PRAKTEK *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

AGNES JULIANDARI¹, PURYANTO², FANI RATNY PASARIBU³, YUMI ARIYATI⁴,
ONZU KRISNO⁵, NURSAADAH KHUDRI⁶

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Ekasakti¹, Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Ekasakti^{2,3}, Dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Ekasakti⁴

email: agnesjuliandari20@gmail.com¹, puryantoyan@yahoo.com²,
faniratnypasaribu@unespadang.ac.id³, yumiariyati27@gmail.com⁴,
onzukrisnokoto@gmail.com⁵, nursaadahkhudri@gmail.com⁶

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan birokrasi Good Governance di Kecamatan Pauh Kota Padang, untuk mengetahui kendala dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan Birokrasi menuju praktek Good Governance Di Kecamatan Pauh Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Sumber primer yang langsung dari informan terhadap 7 Narasumber dan juga dilakukan observasi. Sumber Sekunder berasal dari Dokumen dan dokumen lapangan. Hasil dari penelitian ini ada 9 Konsep yang digunakan dalam pembentukan Good Governance Di Kecamatan Pauh Kota Padang yaitu adanya partisipasi Masyarakat, tegaknya supremasi Hukum, Transparansi, Peduli kepada Stakeholder, Beorientasi pada masyarakat, Kesetaraan semua Masyarakat, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategis. Kendala yang terjadi adalah kurangnya partisipasi masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, tidak transparansi, membedakan masyarakat sesuai dengan sosial ekonomi, tidak beorientasi pada masyarakat, pelayanan yang kurang efektif dan efisien, kurang baiknya akuntabilitas dalam Pelayanan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah dengan memperbaiki secara cepat kesalah pahaman antara pegawai dan juga masyarakat, merekrut pegawai dan melakukan pelatihan, tidak membedakan pelayanan terhadap masyarakat, pimpinan dituntut menyetarakan masyarakat dari segi ekonomi dan sosial, program kerja yang harus diselesaikan sesuai dengan SOP.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan, Good Governance, Birokrasi*

Abstract: The purpose of this research is to find out the government's implementation in realizing Good Governance bureaucracy in Pauh District, Padang City, to find out the obstacles and also to find out what efforts must be made to overcome obstacles in government administration in realizing Bureaucracy towards Good Governance practices in Pauh District, Padang City. The research method used in this research is a descriptive research method with a qualitative approach. The data sources in this research consist of primary sources directly from informants and 7 sources and also observations. Secondary sources come from documents and field documents. The results of this research are 9 concepts used in the formation of Good Governance in Pauh District, Padang City, namely community participation, upholding the supremacy of law, transparency, care for stakeholders, community orientation, equality for all communities, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. . The obstacles that occur are lack of community participation, abuse of power, lack of transparency, differentiating communities according to socio-economics, not being community oriented, services that are less effective and efficient, and lack of accountability in services. Efforts made to overcome the problem are by quickly correcting misunderstandings between employees and the community, recruiting employees and conducting training, not discriminating between services to the community, leaders are

required to equalize the community from an economic and social perspective, work programs must be completed in accordance with subject, object, predicate.

Keywords: *Administration, Good Governance, Bureaucracy*

A. Pendahuluan

Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Jadi pemerintahan diartikan sebagai organisasi atau lembaga. Sumaryadi mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki; (1) otoritas memerintah dari sebuah unit politik, (2) kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political society*) (3) aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan

menjalankan kekuasaan (4) kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan unsur yang paling penting untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan sebuah organisasi. Untuk itu, *Max Weber* mengajukan model tipe ideal birokrasi yang mencerminkan keadaan administrasi yang ada semasa beliau hidup. Tipe ideal ini merupakan konstruksi abstrak yang membantu dalam memahami kehidupan sosial, Menurut *Weber*, tipe ideal ini dipergunakan untuk menjawab suatu permasalahan pada kondisi waktu dan tempat tertentu. Kecamatan Pauh merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedang mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good governance*, semua aparat kecamatan dituntut harus profesional dalam melakukan pekerjaannya. Profesionalisme sebagai refleksi dari cerminan kemampuan, keahlian dapat berjalan efektif apabila didukung oleh adanya kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja pegawai menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana diketahui bahwa birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi. Dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Birokrasi adalah organisasi dimana kekuasaan sepenuhnya berada ditangan para pejabat resmi yang memenuhi persyaratan keahlian (*technical skills*). Pelaksanaan *good governance* di indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis sejak munculnya era reformasi. Era tersebut menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* menjadi salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Penerapan *good governance* di indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik. Hal ini tercermin dari tuntutan yang masih dari masyarakat kepada penyelenggara negara, baik dipemerintahan, dewan perwakilan maupun yudikatif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Artinya, terselenggaranya *good governance* merupakan cita-cita dan harapan bagi setiap bangsa. Secara umum, *good governance* dapat diartikan sebagai proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan dan manusia menurut kepentingan semua pihak dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparan dan akuntabilitas.

Berdasarkan perumusan visi kota padang tersebut dan dengan mempertimbangan kondisi umum kecamatan pauh serta perkiraan potensi yang dapat dikembangkan dimasa datang, maka dirumuskan visi Kecamatan Pauh adalah :” Terwujudnya kecamatan pauh yang religius, Sejahtera serta profesional dalam pelayanan” Makna pokok yang harus terkandung dalam visi adalah” visi pertama, Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, mengedepankan muamallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam rangkap penciptaan madani. Visi kedua, Sejahtera, dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah

cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat, Visi ketiga Profesional dalam pelayanan hal ini dimaksudkan memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernyataan misi pertama Kecamatan Pauh Kota Padang Sumatera Barat Mengacu kepada rumusan diatas dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beragama beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”, Misi kedua, Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional dalam pelayanan, Misi ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan koperasi dan ekonomi produktif, Misi keempat, Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, Misi kelima, Mewujudkan peran serta generasi muda yang terampil dan berwawasan.

Dalam melaksanakan *good governance* di kantor Kecamatan Pauh Kota Padang masih belum memenuhi tuntutan tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memadai. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai “Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi Menuju Praktek *Good Governance* di Kecamatan Pauh Kota Padang”

B. Metode

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian, dimana akan membantu mengarahkan dan memudahkan penyusunan pelaksanaan kegiatan penelitian. Metodologi penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang di gunakan dalam penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan dan melihat kaitan variabel yang diteliti, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dapat dianalisis dengan cara hanya menggambarkan dan menguraikan serta menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi “Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Mewujudkan Birokrasi Menuju Praktek *Good Governance* di Kecamatan Pauh Kota Padang”

C. Hasil Dan Pembahasan

1. *Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju Praktek Good Governance Di Kecamatan Pauh Kota Padang*

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang belum memuaskan bagi masyarakat yang mengunjungi karna masih banyak kekurangan pada sistem pelayanan dikecamatan pauh kota padang atau kekurangan dari masyarakat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, hal itu dapat peneliti temui pada wawancara dengan bapak Yoserizal Se, Mm selaku Camat Pauh Kota Padang

“Untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek Good Governance Di Kecamatan Pauh Kota Padang ada beberapa tahap untuk pelaksanaannya rapat dengan organisasi peraturan daerah terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek Good Governance Di Kecamatan Pauh Kota Padang , merencanakan formasi kerja, menyusun SOP. Dan dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan terjalannya good governance di kecamatan pauh kota padang.

Dalam penelitian ini Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang belum sepenuhnya berjalan maksimal dimana hal itu dapat kita lihat dari berbagai faktor sesuai dengan konsep peneliti yaitu yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Untuk menjalankan sebuah birokrasi partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting sekali karena pada dasarnya pemimpin yang dipilih adalah warga masyarakat yang diberikan kepercayaan lebih masyarakat lainnya untuk mengatur masyarakat-masyarakat yang ada di sebuah Kecamatan. Partisipasi masyarakat dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat mereka.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Arti dari kata Supremasi Hukum yaitu upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Indonesia adalah negara Hukum yang semuanya diatur oleh hukum dan Undang-undang yang berlaku, sama halnya dengan sebuah lembaga permasyaratan yang adanya lembaga tersebut diatur dan disahkan dengan Hukum, mengikuti hukum yang berlaku dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Mulai dari lembaga tertinggi dan lembaga paling rendah pun diatur dengan hukum, mulai dari Negara dan semua aspek yang ada di dalam diatur oleh Hukum. Sama halnya dengan Kecamatan Pauh Kota Padang ini, keberadaannya saat ini juga diatur oleh hukum dan undang-undang baik peraturan Negara dan juga peraturan Daerah yang berlaku Sebagai Lembaga yang mengayomi masyarakat Kecamatan harus memiliki pemimpin yang memiliki keadilan yang tinggi, tidak pandang orang pintar, kaya miskin atau bodoh. Bila masyarakatnya melakukan kesalahan harus diberi sanksi atau yang nantinya tidak akan diulang.

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan diantara lembaga Birokrasi dan juga Masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya website resmi Kecamatan Pauh dan juga Facebook resmi Kecamatan pauh yang selalu Update tentang kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Pauh. Semua kegiatan akan difoto sebagai dokumentasi dan di share ke Facebook jadi masyarakat yang ada di Rantau juga bisa melihat bagaimana perkembangan dari Kecamatan Pauh. Website ini bisa diakses oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Inilah salah satu transparansi lembaga birokrasi terhadap Masyarakat

4. Peduli Pada Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan peran dalam suatu organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Sebagai lembaga yang bertugas untuk melayani masyarakat lembaga Kecamatan tidak boleh membedakan-bedakan kepentingan masyarakat, jadi pihak Kecamatan melayani semua lapisan masyarakat malai dari kalangan bawah, menengah dan kalangan atas yang membutuhkan bantuan dari pihak Kecamatan.

5. Berorentasi Pada Konsensus

Hal ini berarti setiap keputusan harus diselesaikan dengan proses musyawarah atau juga bisa juga disebut sebagai suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah berbagai kepentingan untuk mencapai suatu kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing sebagai contoh di Kecamatan Pauh ada rumah warga yang kemalingan, untuk menghindari warga yang kesal sehingga di bawa maling tersebut ke Kecamatan untuk di tindak lanjuti, Camat berperan sebagai Penengah dari masalah tersebut, tindakan seperti apa yang akan diambil di korban dan bagaimana cara Camat menyelesaikan masalah tersebut.

6. Kesetaraan Semua Warga

Yang dimaksud dalam kesetaraan semua warga adalah tidak membedakan masyarakat dari segi gender, sosial dan ekonomi. Untuk membangun sebuah masyarakat yang maju haruslah memiliki pemimpin yang tidak membedakan masyarakat dari segi apapun, seorang pemimpin dituntut untuk membangun sebuah daerah menjadi lebih maju mulai dari perekonomian, soal serta masyarakatnya agar tercipta pemerintah baik. Untuk ikut mensejahterakan masyarakatnya pemimpin berupaya untuk membangun dari segi perekonomian sosial dan juga pendidikan, seperti mengadakan pelatihan untuk masyarakat yang ingin berwirausaha, memberdayakan UMKM (usaha Mikro Kecil

Menengah) masyarakat atau dengan mem'berikan bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu di daerah. Jadi tidak ada kata kesenjangan bagi warga masyarakat.

7. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sama halnya dengan sebuah Organisasi yang harus memiliki pemimpin untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat. Kecamatan Pauh dikatakan sebagai sebuah pemerintahan karena memiliki pemimpin yang bertanggung jawab penuh dengan semua peraturan yang ada dan peraturan yang dibuatnya.

8. Efektifitas dan Efisiensi

Menurut United National Development Programme pada tahun 1999, efektifitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan suatu yang benar-benar dibutuhkan. Seluruh lembaga pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi kerja. Dalam *Good Governance* efektifitas artinya penyelenggaraan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan strategis yang ditetapkan, efisiensi artinya penyelenggaraan dilakukan secara hemat budaya guna dan berhasil guna.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Hal ini juga sama dengan yang terjadi dikecamatan pauh membutuhkan pemimpin yang pahan dengan kinerjanya dalm membangun sebuah birokrasi untuk mewujudkan *Good Governance*

2. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju Praktek Good Governance di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Adapun kendala Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang Selama melakukan penelitian di Kecamatan Pauh kota Padang ini sebagai birokrasi yang menyediakan pelayanan Publik Kecamatan Pauh memiliki beberapa Kendala dan juga hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Birokrasi Menuju *Good Governance* di Kecamatan Pauh. Berkaitan dengan visi dan misi kantor camat pauh serta program, maka dituntut untuk turut berpatisipasi nyata khususnya dalam bidang kasi pemerintahan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Kantor camat pauh melalui program administrasi terpadu dituntut untuk mendorong masyarakat agar berpatisipasi dalam pengurusan surat menyurat. Akan tetapi masih masih ada kendala permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan peraturan menteri tersebut baik dari faktor komunikasi antar pegawai kantor camat dengan masyarakat sehingga menjadi lambatnya proses pelayanan administrasi dalam kasi pemerintahan. Namun demikian telah dibuat perencanaan yang matang dalam penerapan good governance yang matang tapi masih ada keluhan atau kelalain yang berdampak buruk terhadap kantor camat pauh. Dimana akan ada isu-isu negatif dari masyarakat tentang kinerja pegawai kantor camat. Sebagai mana peneliti temui pada saat wawancara dengan bapak Yoserizal Se, MM selaku camat pauh kota padang. Dimana terdapat kendala seperti peraturan formulasi kerja yang masih belum maksimal, serta penyusunan SOP dari setiap pelayanan yang berbeda-beda masih terdapat kekurangan dan belum maklsimal baik dari segi waktu ataupun sosialisasi pegawai terhadap masyarakat masih kurang dan belum sesuai dengan fungsinya.

3.Upaya dalam Mengatasi Kendala Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Praktek Good Governance di Kecamatan Pauh

Adapun upaya yang dihadapi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang Selama melakukan penelitian di Kecamatan Pauh kota Padang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang Selama melakukan penelitian di Kecamatan Pauh kota Padang Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Deswarman, S.Sos, MM selaku lurah pisang mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam kebijakan penerapan *Good Governance* Salah satu upaya yang dilakukan kecamatan pauh yaitu dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dibidang administrasi, hal ini sangat penting dilakukan agar masyarakat agar mendapatkan pelayanan dengan cepat,mudah dan transparan.

D. Penutup

Simpulan

Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Mewujudkan Birokrasi Menuju Good Governance di Kecamatan Pauh Kota Padang, pelaksanaannya rapat dengan organisasi peraturan daerah terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang , merancang formasi kerja, menyusun SOP. Dan dengan demikian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan terjalannya *good governance* di kecamatan pauh kota padang. Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwasanya Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Mewujudkan Birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap agar pelaksana berjalan dengan kegiatan Kecamatan.

Saran

Mewujudkan birokrasi menuju praktek *Good Governance* Di Kecamatan Pauh Kota Padang ialah : Pegawai kecamatan harus lebih peduli kepada masyarakat yang tidak mengerti akan teknologi. Kepala Kecamatan Pauh harus lebih tegas lagi apabila ada pegawai yang tidak disiplin atau tidak mengikuti aturan yang berlaku, hal ini berpengaruh juga terhadap kualitas pegawai. Harus lebih terbuka kepada masyarakat, dan lebih mengayomi masyarakat. Dan untuk masyarakat juga harus ikut bekerjasama dengan pemerintah membangun Kecamatan.

Daftar Pustaka

- Buku Ajar, 2019, *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Kamaruddin Sellang, S.sos., M, AP, CV. Penerbit Qiara Media, Hal.78
- Dr. Drs. Ismail Nurdin. M.SI, 2017, *etika pemerintahan norma, konsep, dan praktek bagi Penyelenggaraan pemerintahan*, Lampung Lintang Rasi Aksara, hal 9-10
- Mamik, 2015, "Metodologi Kualitatif", Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Marlin Marlianti,2013 Jurnal: Studi tentang *profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan good governance di kec.Linggang Bingung, Kab.Kutai Barat*, Program magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Volume 2 No 1 Halaman 155-159 Diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 17.58 WIB
- Prof. Dr.Sugiyono,2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung Alfabeta
- Wawancara dengan Bapak Deswarman, S.Sos,MM selaku Lurah pauh kota padang tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Ir.Akmal.,M.Si selaku sekretaris kecamatan pauh kota padang pada tanggal 27 maret 2023 pukul 11.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Yoserizal Se,Mm selaku camat pauh kota padang pada tanggal 27 maret 2023 pukul 10.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Yoserizal Se,Mm selaku camat pauh kota padang pada tanggal 27 maret 2023 pukul 10.00 WIB